



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PANGANDARAN



**Jl. Bandara Nusawiru No. 10 Cijulang
Pangandaran
Kode Pos 46394**



(0265) 7500643



dinaskpkp@gmail.com



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran (DKPKP) Tahun 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017 – 2021 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Program Kegiatan pada RENJA PERUBAHAN 2021 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA Dinas tahun ke-5 dan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 60 Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dengan tetap mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya juga merumuskan program/kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya pada tahun 2017-2021 untuk menyesuaikan dengan kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahantahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja PerubahanPerangkat Daerah tahun 2021 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program/ kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Cijulang, 11 Oktober 2021
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan

DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM

Pembina, Iv/a

NIP. 19710628 200312 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH SEMESTER 1	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Semester 1 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB III	18
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	18
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah	21
3.3. Program dan Kegiatan	22
BAB IV	23
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB V	28
PENUTUP	28



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahanperangkat daerah Tahun 2021 dan pencapaian Renja Perubahanperangkat daerah Tahun 2021	7
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PerubahanDinas /kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021	22



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proyek Prioritas Strategis	18
Gambar 2. Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman	19



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel T-C 29.....	32
Lampiran 2 Tabel T-C 31.....	33
Lampiran 3 Tabel T-C 30.....	34
Lampiran 4 Tabel T-C 32	35
Lampiran 5 Tabel T-C 33.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana Kerja Perubahan pemerintah daerah, menjelaskan bahwa proses penyusunan Renja Perubahan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada pasal 16 ayat 2 terdiri dari 6 (enam) tahapan yang meliputi a) persiapan penyusunan b) penyusunan rancangan awal c) penyusunan rancangan d) pelaksanaan musrenbang e) perumusan rancangan akhir f) penetapan.

Renja Perubahan perangkat daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 didasarkan pada Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2017-2021 tahun ke-5 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);



23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
30. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan;
31. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor Tahun 2017 Nomor 53);
32. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perubahan(Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 67);



33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;
34. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Nomor 800/KPTS.43/DKPKP/II/2017 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Pembangunan (RENSTRA) dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021;
35. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Nomor 050/47/DKPKP/II/2017 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021;
36. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Nomor 050/340.a/Kpts.-DKPKP/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Nomor 050/131/DKPKP/IV/2017 Tanggal 17 April 2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2021;
37. Keputusan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Nomor 050/517/DKPKP/VIII/2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pada perangkat daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah khususnya lingkup Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

2. Tujuan

- a. Menyediakan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2021;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN



- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH SEMESTER 1

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Semester 1 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV. RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V. PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH
SEMESTER 1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Semester 1
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dan pencapaian Renja Perubahan Perangkat Daerah sampai Bulan Juni Tahun 2021 sebagaimana Tabel T-c.29 sebagaimana lampiran 1.
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp. 7.916.343.877,-
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021 sampai Bulan Juni Tahun 2021 Rp 1.862.594.115,-
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan pencapaian Renja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2021 Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahanperangkat daerah Tahun 2021 dan pencapaian Renja Perubahanperangkat daerah Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI		Realisasi		
		KEU (RP)	%	Rencana	Realisasi	% FISIK
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.644.894.627	1.476.721.215	41			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.697.500	28.387.500	54			121,43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.337.500	19.285.500	56	7 dokumen 1 orang	5	71,43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.360.000	9.102.000	50	4 dokumen 1 orang 24 dokumen	6	50



Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.108.708.319	1.211.411.591	39			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.036.233.319	1.193.843.591	39	14 bulan	6	50
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	25.775.000	11.703.000	45	12 dokumen 1 orang	6	50
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.925.000	5.865.000	13	1 dokumen	1	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	775.000	-	-	2 dokumen	0	0
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.850.000	11.050.000	48			
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.850.000	11.050.000	48	12 dokumem 1 orang	6	50
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.870.000	10.870.000	52			
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	20.870.000	10.870.000	52	12 dokumen 1 Orang	6	50
Kegiatan Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.950.000	3.375.000	31			
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10.950.000	3.375.000	31	4 kali	1	25
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.059.830	124.010.800	68			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.439.080	995.000	41	10 jenis	4	40
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81.102.900	80.102.900	99	95 jenis	95	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.662.000	18.918.100	68	3 jenis	6	50



Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.043.650	2.230.000	32	5 jenis	- 8200 - 18 - 1 - 1 - 0	50
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.359.000	5.530.000	24	15 buah	6	50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39.453.200	16.234.800	41	18 kali	6	33,3333 3
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	185.056.331	63.100.624	34			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000	1.377.000	60	400 buah	75	18,75
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.347.000	19.582.324	42	2 rekening	6	50
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.409.331	42.141.300	31	1 orang 2 orang 2 orang 1 orang 1 orang	6	50
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.702.647	24.515.700	39			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.118.296	23.435.700	52	11 unit	6	54,55
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.984.351	1.080.000	11	20 jenis	6	30
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.600.000	-	-	3 gedung	0	0
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	500.000.000	-	-			
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	500.000.000	-	-	- 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit	0	0
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat	568.062.600	250.071.300	44			
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan	58.231.600	21.224.800	36			



Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kotadalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	40.360.600	13.661.200	34	1 desa	0	0
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	17.871.000	7.563.600	42	12 dokumen	6	50
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	509.831.000	228.846.500	45			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	509.831.000	228.846.500	45	1 dokumen	0	0
Program Penanganan Kerawanan Pangan	89.773.500	14.144.900	16			
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	89.773.500	14.144.900	16			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	16.089.000	8.067.100	50	- 2 lokasi - 1 dokumen - 3 kelompok	0	0
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	73.684.500	6.077.800	8	100 ton	12,3	12,3
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.629.649.650	56.935.000	3			
Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	393.394.400	28.513.000	7			



Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	393.394.400	28.513.000	7	- 10 kecamatan - 50 kelompok	50%	50
Kegiatan Pengelolaan pembudidayaan ikan	1.236.255.250	28.422.000	2			
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.236.255.250	28.422.000	2	- 100.000 ekor - 2 fungsi	52500	52,5
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.476.262.500	60.621.700	4			
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.205.133.000	18.689.800	2			
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	109.687.000	960.000	1	- 1 kegiatan - 1 kegiatan - 8 lokasi	0	0
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (DAK)	848.950.000	-	-	42 paket	0	0
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	246.496.000	17.729.800	7	265 unit	0	0
Kegiatan Pengelolaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.493.500	21.143.900	48			
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	44.493.500	21.143.900	48	- 500 orang - 50 orang	- 0 - 179	358
Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	226.636.000	20.788.000	9			



Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	226.636.000	20.788.000	9	- 11.000 blok - 8 koperasi	- 0 - 4	50
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	7.701.000	4.100.000	53			
Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	7.701.000	4.100.000	53			
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	7.701.000	4.100.000	53	- 11 kelompok - 2 kecamatan	- 5 - 1	45,45
TOTAL	7.916.343.877	1.862.594.115	23,53			

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran secara keseluruhan sampai bulan Juni yaitu sebesar 23,53%

Realisasi Program/Kegiatan yang belum memenuhi target (<40%) sampai bulan Juni antara lain: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,

Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi target (41-60%) sampai bulan Juni antara lain: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan



Listrik, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Realisasi Program/Kegiatan yang mencapai target (>60%) sampai bulan Juni antara lain: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:

- beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan sampai akhir tahun anggaran;
- kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) menunggu perubahan;
- ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya di kerjakan pada triwulan IV;
- Terdapat kegiatan yang sudah memenuhi target, dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut yang semula akan dilaksanakan pada semester kedua, namun pada realisasi nya sudah dilaksanakan pada semester pertama.

Implikasi yang timbul terdapat target capaian program perangkat daerah mengakibatkan perlunya penjelasan kembali kebutuhan anggaran tiap-tiap kegiatan, sehingga target indikator kinerja yang sudah direncanakan dapat tercapai.

Penyesuaian kembali pagu anggaran pada tiap-tiap kegiatan. Beberapa kegiatan masih kekurangan anggaran sehingga pada semester kedua perlu penambahan anggaran, begitu pula untuk kegiatan-kegiatan yang sudah mencapai target kinerja perlu dilakukan rasionalisasi. Penyesuaian pagu anggaran dilaksanakan pada tahapan penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tolak ukur dan indikator kinerja Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sebagaimana dituangkan pada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja yang disajikan tersebut disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran sampai dengan triwulan II Tahun 2021 dengan predikat sangat berhasil yang diukur dari 2 Indikator Kinerja Utama yaitu persentase kontribusi sektor perikanan (%) dan Skor Pola Pangan Harapan. Informasi lebih lengkap disajikan pada tabel T-C 30 sebagaimana lampiran 2



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan memiliki lingkup pelayanan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Ketahanan Pangan. Sebagai lembaga dengan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang Perikanan dan kelautan serta pangan, maka Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis bidang Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Bidang Ketahanan Pangan.

Tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana identifikasi isu-isu penting sektor Perikanan dan ketahanan pangan, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ketidakpastian produksi ikan tangkap
Ketidakpastian produksi tangkapan ikan karena ketidakpastian cuaca, cuaca yang ekstrim, ketidakpastian arah angin dan gelombang, juga dikarenakan sarana prasarana penangkapan ikan belum memadai seperti armada penangkapan ikan masih kecil (di bawah 5 GT), pengetahuan dan keterampilan nelayan terbatas.
- 2) Masih kecilnya PAD dari sektor perikanan
PAD dari sektor perikanan bersumber dari retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Masih adanya transaksi penjualan hasil tangkapan nelayan yang dilakukan di luar TPI yang menyebabkan belum maksimal/optimalnya PAD sektor perikanan.
- 3) Kualitas infrastruktur perikanan masih belum memadai
Infrastruktur perikanan dapat mendukung produksi perikanan dan meningkatkan perekonomian nelayan. Infrastruktur perikanan diantaranya, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Alat Tangkap dan Alat Bantu Perikanan, Tempat Pendaratan Perahu, bangunan pengaman pantai dan keselamatan nelayan.
- 4) Data jumlah nelayan, pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan yang belum valid/akurat
Pendataan nelayan, pengolah dan pemasar produk kelautan dan perikanan perlu dilaksanakan, sehingga tercipta data base yang akurat. Data base tersebut dapat bermanfaat diantaranya untuk pembuatan KUSUKA dan Asuransi Nelayan.
- 5) Belum tersedianya benih dan induk ikan yang berkualitas sehingga perlu operasionalisasi Balai Benih Ikan (BBI) dalam rangka memenuhi ketersediaan benih dan induk ikan yang berkualitas.



- 6) Potensi pengembangan pasar ikan dalam rangka pengelolaan dan manajemen pemasaran hasil budidaya perikanan.
- 7) Informasi harga pasar benih dan ikan konsumsi air tawar belum stabil, sehingga perlu standarisasi harga oleh instansi terkait
- 8) Peningkatan kapasitas produksi ikan melalui bantuan benih ikan, calon induk ikan, pakan dan penataan kelompok.
- 9) Pemberdayaan kelompok perikanan melalui pembinaan dan pengembangan kelompok perikanan.
- 10) Menurunnya populasi ikan dan udang di perairan umum sehingga perlu dilakukan restocking ikan/udang di perairan umum
- 11) Pengembangan kapasitas kelompok dalam rangka ketersediaan pakan ikan mandiri melalui pelatihan dan bantuan sarana pembuatan pakan ikan.
- 12) Belum adanya forum kelompok pembudidaya ikan, sehingga perlu adanya suatu wadah untuk diskusi dan tukar menukar informasi antar pokdakan.
- 13) Pembinaan kelompok pembudidaya ikan agar berbadan hukum untuk menjamin legalitas hukum kelompoknya.
- 14) Antisipasi di musim kemarau sehingga perlu adanya ketersediaan prasarana pompa air/sumur air.
- 15) Di musim penghujan yang terus menerus semua pembudidaya berhati-hati timbulnya penyakit, upayakan untuk menjaga kualitas air dan kesehatan lingkungan.
- 16) Lemahnya akses pangan masyarakat sehingga perlu pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah.
- 17) Mengaktifkan kembali peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sebagai media koordinasi lintas sector dalam pengembangan pangan lestari.
- 18) Mengatasi tingginya prosentase penduduk rawan pangan dengan meningkatkan penanganan daerah rawan pangan melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia di lingkungan.
- 19) Pemantauan harga dan pasokan pangan pokok secara berkelanjutan untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan mengatasi fluktuasi harga.
- 20) Mengatasi tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras melalui percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP)
- 21) Pengembangan dan percepatan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal dalam rangka mengatasi ketergantungan pada pangan impor/luar daerah.



- 22) Masih ditemukannya ketidakamanan pangan sehingga perlu penguatan dan pembinaan keamanan pangan.
- 23) Melakukan pengembangan kelembagaan cadangan pangan untuk meningkatkan ketersediaan pangan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.
- 24) Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran ketersediaan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal).
- 25) Melakukan antisipasi dan penanganan situasi yang berpotensi terjadinya rawan pangan dan gizi.
- 26) Melakukan terobosan peningkatan akses pangan melalui perbaikan distribusi pangan yang efektif dan efisien.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah. Pada prosesnya review/penyempurnaan dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2016-2021 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, maka fungsi dan tugas Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan terkait erat dengan pencapaian misi Kabupaten ke-6 yaitu membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Hasil review dan analisa terhadap Rancangan Awal Renja Perubahantahun 2021, sebagaimana tersaji pada Tabel T-C.31 (lampiran 3).

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan perangkat daerah. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya pada Perangkat Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Perubahandengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada Musrenbang Kecamatan ada beberapa usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan selaku Perangkat Daerah, terdiri dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah kabupaten.



Adapun usulan yang disampaikan pada saat pembahasan dapat diakomodir dan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan.

Usulan-usulan program/kegiatan yang terkait dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi yang termuat pada hasil Musrembang Kecamatan tersaji pada Tabel T-C.32 sebagaimana lampiran 4.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2021-2024 adalah :

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu :

- 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
- 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
- 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
- 9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Proyek prioritas strategis (*Major Project*) RPJMN 2021-2024 ditunjukkan dalam Gambar berikut.



Gambar 1. Proyek Prioritas Strategis



Sedangkan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan kemaritiman dan kelautan ditunjukkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pembangunan Kemaritiman

Selanjutnya ada 5 misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah provinsi jawa barat tahun 2018-2023 yang terdiri dari :

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban;
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada program prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat terdapat pada misi 4 dengan sasaran 1 “Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang mandiri untuk mencapai kedaulatan pangan” dengan indikator kinerja sasaran yaitu “nilai tukar petani (NTP)” dan memiliki arah kebijakan yaitu Revitalisasi lahan, dukungan infrastruktur, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan sumber daya manusia.

Adapun Strategi yang tertera dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu Mengembangkan inovasi untuk peningkatan



produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Sedangkan Program yang tertera dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu:

1. Laut Juara

- a. Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RZWP3K Jawa Barat
- b. Pendayagunaan Masyarakat Pesisir dalam Rehabilitasi Kawasan Terumbu Karang dan Kawasan Mangrove serta Pengelolaan Sampah Laut (*Marine Debris*)
- c. Pelestarian Plasma Nutfah;
- d. Peningkatan kompetensi SDM, sarana, prasarana dan operasional pengawasan SDKP.

2. Nelayan Juara

- a. Sertifikasi Kompetensi Nelayan dan Asuransi Nelayan
- b. Sertifikasi Kompetensi Pembudidaya Ikan dan Asuransi Usaha Budidaya
- c. Sertifikasi Kompetensi UPI dan Pemasar Hasil Perikanan
- d. Peningkatan Kompetensi petambak garam
- e. Peningkatan Manajemen Usaha Kelautan dan Perikanan

3. Gudang Ikan Juara

- a. Peningkatan Operasional Pelabuhan Perikanan;
- b. Peningkatan sarana dan teknologi perikanan tangkap;
- c. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Perikanan Budidaya
- d. Revitalisasi Tambak Wilayah Utara dan Akselerasi Tambak Wilayah Selatan
- e. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Produksi Garam
- f. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Teknologi Distribusi, Pengolahan, serta Pemasaran Hasil Perikanan
- g. Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan
- h. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Akses Permodalan

Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program/kegiatan perangkat daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahunan. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan maka Kebijakan Nasional yang berkaitan langsung adalah pada Dimensi Pembangunan Sektor Kedaulatan Pangan dan Sektor Kemaritiman. Adapun fokus pembangunan tahun 2021 berdasarkan arah kebijakan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Pangandaran yaitu Penataan Destinasi Wisata, sehingga fokus program kegiatan tahun



2021 pada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan juga dalam rangka mendukung arah kebijakan kabupaten tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah

Berdasarkan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Pangandaran, focus pembangunan tahun 2021 adalah “Pencapaian RPJMD melalui Operasionalisasi RSUD, Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Pemerintahan Menuju Masyarakat Pangandaran Sejahtera Lahir Batin”. Prioritas pembangunan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, budaya dan keagamaan;
2. Peningkatan pengelolaan pariwisata dan bangkitan perekonomian daerah;
3. Pembangunan sarana prasarana pemerintahan serta sumberdaya pendukungnya berbasis teknologi informasi;
4. Stabilitas keamanan, sosial dan politik serta daya dukung penyelenggaraan Pilkada;
5. Pembangunan infrastruktur dasar terdiri dari jalan poros kabupaten, jembatan, sarana permukiman, sarana pengairan dan sarana perekonomian;
6. Penyelenggaraan penanggulangan bencana;
7. Dukungan terhadap program dan kegiatan pembangunan pemerintah, perintah provinsi dan pemerintah desa.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran melaksanakan 2 urusan, yaitu Urusan Pangan dan Urusan Kelautan/Perikanan, sehingga program kegiatan di Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran mendukung prioritas ke-5 (Penyediaan infrastruktur strategis kabupaten di perkotaan dan pedesaan serta wilayah pesisir) dan prioritas ke-7 (Peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kondusifitas, daya saing, ketahanan pangan, ketahanan sosial, kesadaran politik dan hukum berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah)

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, tujuan Rencana Kerja Perubahan tahun 2021 berdasarkan Renstra Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran 2017-2021 adalah: Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengembangan sektor Kelautan/Perikanan dan Penganekaragaman Pangan.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai tujuan dalam rencana kerja 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas /kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah melalui pengembangan sektor Kelautan/Perikanan dan Penganekaragaman Pangan	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan (%)	2,20 %
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor)	97

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2021 mencakup 9 Program dan 18 kegiatan.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 tersebut merupakan hasil evaluasi program dan kegiatan semester pertama yang tertuang pada Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel T-C 33 (lampiran 5).



BAB IV

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan perangkat daerah (Renja) Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021 sebagai acuan bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang berisi program dan kegiatan serta pagu anggaran.

Sebagai tindak lanjut RKPD Perubahan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 60 Tanggal 27 Juli 2020 Tentang Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dengan menyusun kebijakan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2021 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2021 harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah direncanakan perlu didukung dengan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan.

Pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2021 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang-bidang maupun dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan (MUSRENBANG), rapat koordinasi maupun penggalan kebutuhan masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip *safe guarding* akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh



hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021 direncanakan akan melaksanakan 1 urusan wajib 2 urusan pilihan dan kesekretariatan. Anggaran yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 7.916.343.877- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rp. 1.157.836.100,-
- b. Urusan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Rp. 6.758.507.777,-

Program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2021 tersebut, antara lain :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan

Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Daerah Sentra Produksi

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Penyediaan pangan berbasis sumber daya local

Pemantauan Stok, pasokan dan harga pangan

Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Penyusunan pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan



kabupaten/kota

Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah

kabupaten/kota

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan

Administrasi Keuangan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Administrasi Umum

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,



Rawa, dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan

penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap

Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap

Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/kota

Pengembangan kapasitas nelayan kecil

Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil

Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil

Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam satu daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan pengembangan , pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat

PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota

Pengawasan usaha Perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota

Pengawasan usaha Perikanan bidang pembudidaya ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/kota

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengelolaan Ikan dalam satu daerah Kabupaten/kota

Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan



dalam satu daerah Kabupaten/kota



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan pelaksanaan rencana strategis tahun ke-4, periode renstra 2017-2021. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Pangandaran dan sasaran Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2021 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Perubahan Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2021, dimana Renja Perubahan Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, seluruh aparatur Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2021.
4. Tata cara penyusunan Renja Perubahan Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
5. Renja Perubahan Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga



pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Perubahan tahun 2021, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan stakeholder, selanjutnya rencana kerja ini untuk digunakan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan Perangkat Daerah tahun 2021.

Cijulang, 11 Oktober 2021
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan



DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM

Pembina, Iv/a

NIP. 19710628 200312 1 005

Tabel 1.3
EVALUASI RENJA TERHADAP RPMD KABUPATEN PANGANDARAN
RKPD TRIWULAN I dan II TAHUN 2021 KABUPATEN PANGANDARAN

No	Kode	SKPD/Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Pada DPA Perangkat Daerah Tahun 2021)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output) (Pada POA Perangkat Daerah tahun 2021)	Target Kinerja dan Anggaran DPA Perangkat Daerah 2021	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)		Ket.
					I		II		III		IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
					Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6/7*100	11 = 10/5*100	12						
		DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN															
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%													
	3.25.3.25.2.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.644.894.627		714.633.989		762.087.226									
	3.25.3.25.2.001.2.01	Kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		52.697.500		10.808.000		17.879.500									
	3.25.3.25.2.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	7 dokumen	6.721.000	5	12.564.500	0								
	3.25.3.25.2.001.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan triwulan	bulan	4 dokumen	4.087.000	3	5.015.000	3								
			Jumlah jasa tenaga administrasi	1 orang													
			Jumlah laporan /monev program / kegiatan	24 dokumen						6	9.102.000,00						
											120,00						
											182.040.000,00						
	3.25.3.25.2.001.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.108.708.319		559.709.613		651.701.978									
	3.25.3.25.2.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji bulanan yang di bayarkan	bulan	14 bulan	3.036.233.319	3	639.433.978	3								
	3.25.3.25.2.001.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	bulan	12 dokumen	5.300.000	3	6.403.000	3								
			Jumlah jasa tenaga operator simda	1 orang						6	11.703.000,00						
											120,00						
											234.060.000,00						
	3.25.3.25.2.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun	dokumen	1 dokumen	45.925.000	0	5.865.000	0								
	3.25.3.25.2.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan semester	dokumen	2 dokumen	775.000	0	-	1								
										1	-20,00						
											-						
	3.25.3.25.2.001.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		22.850.000		5.350.000		5.700.000									
	3.25.3.25.2.001.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan BMD	bulan	12 dokumen	5.350.000	3	5.700.000	3								
			Jumlah jasa tenaga operator simda BMD	1 orang						6	11.050.000,00						
											120,00						
											221.000.000,00						
											-						
	3.25.3.25.2.001.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		20.870.000		5.100.000		5.770.000									
	3.25.3.25.2.001.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pendapatan	bulan	12 dokumen	20.870.000	3	5.100.000	3								
			Jumlah jasa tenaga operator simda pendapatan	1 Orang						6	10.870.000,00						
											120,00						
											217.400.000,00						
											-						
	3.25.3.25.2.001.2.05	Kegiatan Administrasi Kepatuhan Perangkat Daerah		10.950.000		-		3.375.000									
	3.25.3.25.2.001.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	umrah sosialisasi peraturan perundang-undangan	kali	4 kali	10.950.000	0	3.375.000	0								
											-						
											67.500.000,00						
											-						
	3.25.3.25.2.001.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		181.059.830		94.274.800		29.736.000									
	3.25.3.25.2.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang di beli	jenis	10 jenis	2.439.080	2	670.000	0								
										2	995.000,00						
											40,00						
											19.900.000,00						
	3.25.3.25.2.001.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang di beli	jenis	95 jenis	81.102.900	95	75.850.900	0								
	3.25.3.25.2.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis makanan dan minuman yang di beli	bulan	3 jenis	27.662.000	3	6.380.700	3								
											12,537.400						
	3.25.3.25.2.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang yang di cetak dan di gandakan	5 jenis	7.043.650	4500		900.000	4500								
			- lembar			-1		-1									
			- buah			-1		-1									
			- buah			-0		-0									
			- buah			-0		-0									
			- buah			-0		-0									
											2.230.000,00						
											44.600.000,00						
	3.25.3.25.2.001.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang di beli tiap bulan	bulan	15 buah	23.359.000	3	2.720.000	3								
										6	5.530.000,00						
											120,00						
											110.600.000,00						
	3.25.3.25.2.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	18 kali	39.453.200	4	7.744.200	0								
										4	16.234.800,00						
											80,00						
											324.696.000,00						
											-						
											-						
	3.25.3.25.2.001.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		185.056.331		29.111.776		33.988.848									
	3.25.3.25.2.001.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi	buah	400 buah	2.300.000	30	470.000	0								
										30	1.377.000,00						
											600,00						
											27.540.000,00						
	3.25.3.25.2.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekoning jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	bulan	2 rekening	46.347.000	3	9.381.476	3								
										6	19.582.324,00						
											120,00						
											391.646.480,00						
	3.25.3.25.2.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pengadministrasi kepegawaian	bulan	1 orang	136.409.331	3	19.260.300	3								
			Jumlah pengadministrasi umum	2 orang													
			Jumlah SDM keamanan setiap bulan	2 orang													
			Jumlah SDM kebersihan setiap bulan	1 orang						6	42.141.300,00						
			Jumlah SDM sopir	1 orang							120,00						
											842.826.000,00						
											-						
											-						
	3.25.3.25.2.001.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		62.702.647		10.279.800		14.235.900									
	3.25.3.25.2.001.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang berizin	unit	11 unit	45.118.296	2	10.279.800	0								
										2	23.435.700,00						
											40,00						
											468.714.000,00						
	3.25.3.25.2.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis perlengkapan kantor yang di pelihara	jenis	20 jenis	9.984.351	0	-	0								
										-	1.080.000,00						
											-						
											-						
	3.25.3.25.2.001.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	gedung	3 gedung	7.600.000	0	-	0								
											-						
											-						
											-						
	2.09.3.25.2.002	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaualatan dan Kemandirian Pangan		500.000.000		-		-									
	2.09.3.25.2.002.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	- lantai jemur	unit	- 1 unit	500.000.000	0	-	0								
			- rumah Rice Milling Unit (RMU)		- 1 unit												
			- gudang lumbung pangan masyarakat		- 1 unit												
			- RMU		- 1 unit												
											-						
	2.09.3.25.2.003	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat		568.062.600		11.320.000		238.742.300									
											-						
											250.071.300,00						
											-						
											5.001.426.000,00						
	2.09.3.25.2.003.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kotadalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		58.231.600		10.589.000		10.635.800									
	2.09.3.25.2.003.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah penerima bibit/bibit tanaman	desa	1 desa	40.360.600	0	7.473.000	0								
											6.188.200						
											-						
											13.661.200,00						
											-						
											273.224.000,00						

2.09.3.25.2.003.2.01.04			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan perkembangan harga bahan pangan pokok	dokumen	12 dokumen	17.871.000	3	3.116.000	3	4.447.600				6	7.543.600,00	120,00	151.272.000,00	
2.09.3.25.2.003.2.04			Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkotaan/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				509.831.000		740.000		228.106.500				-	228.846.500,00	-	4.576.930.000,00	
2.09.3.25.2.003.2.04.02			Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Ragam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah dokumen hari pangan sedunia (HPS) tingkat provinsi	dokumen	1 dokumen	509.831.000	0	740.000	0	228.106.500				-	228.846.500,00	-	4.576.930.000,00	
2.09.3.25.2.004			Program Penanganan Kerawanan Pangan				89.773.500		7.314.700		6.830.200				-	14.144.900,00	-	282.898.000,00	
2.09.3.25.2.004.2.02			Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				89.773.500		7.314.700		6.830.200				-	14.144.900,00	-	282.898.000,00	
2.09.3.25.2.004.2.02.01			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	- Jumlah desa rawan pangan yang diintervensi - jumlah dokumen penelaahan - koordinasi dewan ketahanan pangan - jumlah penerima manfaat	- lokasi - dokumen - kelompok	- 2 lokasi - 1 dokumen - 3 kelompok	16.089.000	0	4.944.700	0	3.122.400				-	8.087.100,00	-	161.342.000,00	
2.09.3.25.2.004.2.02.02			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyediaan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan daerah yang tersedia	ton	100 ton	73.684.500	51	2.370.000	51	3.707.800				102	6.077.800,00	2.040,00	121.556.000,00	
3.25.3.25.2.004			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				1.629.649.650		22.284.000		34.651.000				-	56.915.000,00	-	1.138.700.000,00	
3.25.3.25.2.004.2.02			Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil				393.394.400		11.010.000		17.503.000				-	28.513.000,00	-	570.260.000,00	
3.25.3.25.2.004.2.02.01			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	- Jumlah kecamatan yang di restocking - Jumlah kelompok binaan	- kecamatan - kelompok	- 10 kecamatan - 50 kelompok	393.394.400	0	11.010.000	0	17.503.000				-	28.513.000,00	-	570.260.000,00	
3.25.3.25.2.004.2.04			Kegiatan Pengelolaan pembudidayaan ikan				1.236.255.250		11.274.000		17.148.000				-	28.422.000,00	-	568.440.000,00	
3.25.3.25.2.004.2.04.03			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah benih ikan berkualitas - Jumlah pelayanan BBI	- ekor	- 100.000 ekor - 2 fungsi	1.236.255.250	31500	11.274.000	31500	17.148.000				63.000	28.422.000,00	#####	568.440.000,00	
3.25.3.25.2.003			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				1.476.262.500		22.827.000		37.794.700				-	60.631.700,00	-	1.212.434.000,00	
3.25.3.25.2.003.2.01			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1.205.133.000		5.710.000		12.979.800				-	18.689.800,00	-	373.796.000,00	
3.25.3.25.2.003.2.01.01			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	- Jumlah dukungan kegiatan P2WKSS - Jumlah kegiatan Gemarikan yang terakreditasi - Jumlah lokasi hajat laut/syukuran nelayan	- kegiatan - kegiatan - lokasi	- 1 kegiatan - 1 kegiatan - 8 lokasi	109.687.000	0	960.000	0	-				-	960.000,00	-	19.200.000,00	
3.25.3.25.2.003.2.01.02			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap ramah lingkungan	paket	42 paket	848.950.000	0	-	0	-				-	-	-	-	
3.25.3.25.2.003.2.01.03			Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah mesin penggerak kapal penangkapan ikan	unit	265 unit	246.496.000	0	4.750.000	0	12.979.800				-	17.729.800,00	-	354.596.000,00	
3.25.3.25.2.003.2.02			Kegiatan Pengelolaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				44.493.500		7.724.000		13.419.900				-	21.143.900,00	-	422.878.000,00	
3.25.3.25.2.003.2.02.01			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	- Jumlah fasilitasi peserta asuransi nelayan - Jumlah nelayan yang mendapatkan pemberdayaan	- orang - orang	- 500 orang - 50 orang	44.493.500 - 179	0 - 179	7.724.000 - 179	0 - 179	13.419.900				-	21.143.900,00	-	422.878.000,00	
3.25.3.25.2.003.2.03			Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				226.636.000		9.393.000		11.395.000				-	20.788.000,00	-	415.760.000,00	
3.25.3.25.2.003.2.03.02			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (DAK)	- Jumlah karcis gelang - Jumlah penyelenggara pelelangan ikan	- blok - koperasi	- 11.000 blok - 8 koperasi	226.636.000 - 2	0 - 2	9.393.000 - 2	0 - 2	11.395.000				-	20.788.000,00	-	415.760.000,00	
3.25.3.25.2.005			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				701.000		1.403.000		2.697.000				-	4.100.000,00	-	82.000.000,00	
3.25.3.25.2.005.2.01			Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				701.000		1.403.000		2.697.000				-	4.100.000,00	-	82.000.000,00	
3.25.05.2.01.01.2.01.01			Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	- Jumlah kelompok masyarakat pengawas - Jumlah lokasi pengawasan	- kelompok - kecamatan	- 11 kelompok - 2 kecamatan	701.000 - 1	3 - 1	1.403.000 - 1	3 - 1	2.697.000				-	4.100.000,00	-	82.000.000,00	
TOTAL							7.909.343.877		779.791.689		1.082.802.426				-	1.602.344.915,00	-	37.251.882.300,00	

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, ZAKAT, DAN KETAHANAN PANGAN
Cipang, 11 Oktober 2021
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM
Pembina, Ia/a
NIP. 19710628 200312 1 005

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Tahun 2021	Realisasi Capaian							Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis		
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)	(17)				
1	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan (%)	-	-	2	2,05	2,1	2,15	2,2	4,06	203,00%	4,09	199,51%	3,25	154,76%	2,32	107,93%	18,02%	0,3	sangat berhasil
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (skor)	-	-	85	88	91	94	97	82	96,47%	89,5	101,70%	93,2	102,42%	94,5	100,53%	0,00%	7,5	sangat berhasil

Cijulang, 11 Oktober 2021
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan

DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM
Pembina, Iv/a
NIP. 19710628 200312 1 005

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Pangandaran

SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja		Besaran / Volume (Rp.)	Catatan
1	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Desa Pananjung, Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung	jumlah lokasi kolam budidaya	2 lokasi	380.550.000,00	Pokok Pikiran DPRD
2	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	kecamatan cimerak, Kab. Pangandaran, Cimerak, Cimerak, Seluruh Kelurahan/Desa	jumlah pengawasan yang dilakukan	3 kali	99.999.608,00	Pokok Pikiran DPRD
3	pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Dusun Tarisi, Kab. Pangandaran, Padaherang, Padaherang	jumlah paket bibit ikan	1 paket	150000000	Pokok Pikiran DPRD
4	Pengembangan Perikanan Budidaya	Desa Cibogo, Desa Pananjung, Dusun Cinangka	1. Jumlah percontohan 2. Jumlah Calon Induk ikan	1. 4 kelompok 2. 10 paket	260.000.000	Pokok Pikiran DPRD
5	Pengembangan Perikanan Budidaya	Desa Pananjung Kec. Pangandaran	Jumlah percontohan budidaya ikan (lele)	4 paket	220.000.000	Musrenbang Kecamatan
6	Pengadaan Benih Ikan Mujaer dan Patin	Desa Mekarsari Kec. Cimerak	jumlah benih ikan	33000 ekor	20.000.000	Musrenbang Kecamatan
7	Bantuan Bibit Ikan Destinasi Wisata Rawa Cogekan (BUMDES)	Desa Kertajaya Kec. Mangunjaya	Jumlah benih ikan mas dan tawes	50000 ekor	50.000.000	Musrenbang Kecamatan
8	Bantuan Kelompok Perikanan	Desa Cibogo Kec. Padaherang	Jumlah percontohan budidaya ikan (gabus)	2 paket	110.000.000	Musrenbang Kecamatan

9	Bantuan Kelompok Perikanan	Desa Kalijati Kec. Sidamulih	Jumlah percontohan budidaya ikan (tawes)	2 paket	110.000.000	Musrenbang Kecamatan
10	Pengadaan Benih Ikan	Dusun Cinangka Desa Panyutran Kec. Padaherang	Jumlah benih ikan (tawes dan nilem)	66000 ekor	14.000.000	Musrenbang Kecamatan
11	Pengadaan Benih Ikan	Dusun Cimadeg Desa Ciganjeng Kec. Padaherang	Jumlah benih ikan (tawes dan nila)	20000 ekor	12.000.000	Musrenbang Kecamatan
12	Pengadaan Calon Induk Ikan	Dusun Kedungwuluh Kec. Padaherang	Jumlah calon induk ikan (nila)	1 paket	4.000.000	Musrenbang Kecamatan
13	Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	Desa Karangjaladri Kec. Parigi	jumlah alat bantu penangkapan ikan (GPS)	10 KUB	150.000.000	Musrenbang Kecamatan
14	Kawasan Rumah Pangan Lestrai (KRPL)	Desa Cimerak Kec. Cimerak	jumlah kelompok wanita tani	1 KWT	50.000.000	Musrenbang Kecamatan

Cijulang, 11 Oktober 2021
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan

DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM

Pembina, Iv/a

NIP. 19710628 200312 1 005

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan SKPD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Pangandaran
SKPD : Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
		Capaian Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								7.916.343.877					
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								1.157.836.100					
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN								500.000.000					
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								500.000.000				575.000.000	
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan		1. Jumlah lantai jemur yang dibangun 2. Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun 3. Jumlah lumbung pangan masyarakat yang diperbaiki 4. Jumlah rice milling unit yang dibangun		Kabupaten Pangandaran		1. 3 unit 2. 2 unit 3. 6 unit 4. 4 unit		500.000.000	Pendapatan asli daerah DAK Fisik Bidang Pertanian Reguler dan Provinsi			575.000.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								568.062.600					
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi								58.231.600					
2.09.03.2.01	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal		1. Jumlah kelompok wanita tani 2. Jumlah penerima benih/bibit tanaman		Kabupaten Pangandaran		1. 1 kelompok 2. 5 kelompok		40.360.600	Pendapatan asli daerah dan provinsi			46.414.690	
2.09.03.2.01	Pemantauan Stok, pasokan dan harga pangan		Jumlah laporan perkembangan harga bahan pangan pokok		Kabupaten Pangandaran		12 dokumen		17.871.000	Pendapatan asli daerah			20.551.650	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								509.831.000				586.305.650	
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal		1. Intensitas uji keamanan pangan 2. jumlah dokumen HPS 3. Jumlah kategori penerima penghargaan adhiyarya pangan nusantara 4. jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan segar 5. jumlah peserta lomba cipta menu 6. Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)		Kabupaten Pangandaran		1. 3 kali 2. 1 dokumen 3. 5 kategori 4. 10 lokasi 5. 10 kelompok		509.831.000	Pendapatan asli daerah			586.305.650	

2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							89.773.500					103.239.525
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota							89.773.500					103.239.525
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan srinkonisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota		1. jumlah desa rawan pangan yang di intervensi 2. jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dewan ketahanan pangan 3. jumlah penerima gabah		Kabupaten Pangandaran		1. 2 lokasi 2. 1 dokumen 3. 3 kelompok	16.089.000	Pendapatan asli daerah				18.502.350
2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten/kota		jumlah cadangan pangan daerah yang tersedia		Kabupaten Pangandaran		100 ton	73.684.500	Pendapatan asli daerah				84.737.175
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												-
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							6.758.507.777					7.772.283.944
3.25.3.25.2.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.644.894.627					4.191.628.821
3.25.3.25.2.001.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							52.697.500					60.602.125
3.25.3.25.2.001.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan Jumlah jasa tenaga operator perencanaan		DKPKP		7 dokumen 1 orang	34.337.500	Pendapatan asli daerah				39.488.125
3.25.3.25.2.001.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		jumlah dokumen laporan triwulan jumlah jasa tenaga administrasi pelaporan dan evaluasi Jumlah laporan /monev program / kegiatan		DKPKP		4 dokumen 1 orang 24 dokumen	18.360.000	Pendapatan asli daerah				21.114.000
3.25.3.25.2.001.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.108.708.319	Pendapatan asli daerah				3.575.014.567
3.25.3.25.2.001.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		jumlah gaji bulanan yang di bayarkan		DKPKP		14 bulan	3.036.233.319	Pendapatan asli daerah				3.491.668.317
3.25.3.25.2.001.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		jumlah dokumen penatausahaan keuangan Jumlah jasa tenaga operator simda keuangan		DKPKP		12 dokumen 1 orang	25.775.000	Pendapatan asli daerah				29.641.250
3.25.3.25.2.001.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		jumlah dokumen laporan akhir tahun		DKPKP		1 dokumen	45.925.000	Pendapatan asli daerah				52.813.750
3.25.3.25.2.001.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD		jumlah dokumen laporan semester		DKPKP		2 dokumen	775.000	Pendapatan asli daerah				891.250

3.25.3.25.2.001.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								22.850.000	Pendapatan asli daerah				26.277.500
3.25.3.25.2.001.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada	Jumlah dokumen penatausahaan BMD Jumlah jasa tenaga operator simda BMD		DKPKP		12 dokumem 1 orang			22.850.000	Pendapatan asli daerah				26.277.500
3.25.3.25.2.001.2.04	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah								20.870.000	Pendapatan asli daerah				24.000.500
3.25.3.25.2.001.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pelaporan pendapatan Jumlah jasa tenaga operator simda pendapatan		DKPKP		12 dokumen 1 Orang			20.870.000	Pendapatan asli daerah				24.000.500
3.25.3.25.2.001.2.05	Kegiatan Adiministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								10.950.000	Pendapatan asli daerah				12.592.500
3.25.3.25.2.001.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	umlah sosialisasi peraturan perundang-undangan		DKPKP		4 kali			10.950.000	Pendapatan asli daerah				12.592.500
3.25.3.25.2.001.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								181.059.830	Pendapatan asli daerah				208.218.805
3.25.3.25.2.001.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang di beli		DKPKP		10 jenis			2.439.080	Pendapatan asli daerah				2.804.942
3.25.3.25.2.001.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK yang di beli		DKPKP		95 jenis			81.102.900	Pendapatan asli daerah				93.268.335
3.25.3.25.2.001.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis makanan dan minuman yang di beli		DKPKP		3 jenis			27.662.000	Pendapatan asli daerah				31.811.300
3.25.3.25.2.001.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang yang di cetak dan di gandakan		DKPKP		5 jenis			7.043.650	Pendapatan asli daerah				8.100.198
3.25.3.25.2.001.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang di beli tiap bulan		DKPKP		15 buah			23.359.000	Pendapatan asli daerah				26.862.850
3.25.3.25.2.001.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		DKPKP		18 kali			39.453.200	Pendapatan asli daerah				45.371.180
3.25.3.25.2.001.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								185.056.331	Pendapatan asli daerah				212.814.781
3.25.3.25.2.001.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai		DKPKP		400 buah			2.300.000	Pendapatan asli daerah				2.645.000
3.25.3.25.2.001.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan		DKPKP		2 rekening			46.347.000	Pendapatan asli daerah				53.299.050

3.25.3.25.2.001.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		jumlah pengadministrasi kepegawaian jumlah pengadministrasi umum jumlah SDM keamanan setiap bulan jumlah SDM kebersihan setiap bulan jumlah SDM sopir		DKPKP		1 orang 2 orang 2 orang 1 orang 1 orang		136.409.331	Pendapatan asli daerah					
															123.994.084
3.25.3.25.2.001.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								62.702.647	Pendapatan asli daerah					72.108.044
3.25.3.25.2.001.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan		jumlah kendaraan yang berizin		DKPKP		11 unit		45.118.296	Pendapatan asli daerah					51.886.040
3.25.3.25.2.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		jenis perlengkapan kantor yang di pelihara		DKPKP		20 jenis		9.984.351	Pendapatan asli daerah					11.482.004
3.25.3.25.2.001.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor yang dipelihara		DKPKP		3 gedung		7.600.000	Pendapatan asli daerah					8.740.000
3.25.3.25.2.004	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya								1.629.649.650	Pendapatan asli daerah					1.874.097.098
3.25.3.25.2.004.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil								393.394.400	Pendapatan asli daerah					452.403.560
3.25.3.25.2.004.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil		- Jumlah kecamatan yang di restocking - Jumlah kelompok binaan		DKPKP		- 10 kecamatan - 50 kelompok		393.394.400	Pendapatan asli daerah, PROV, APBN					452.403.560
3.25.3.25.2.004.2.04	Kegiatan Pengelolaan pembudidayaan ikan								1.236.255.250	Pendapatan asli daerah					1.421.693.538
3.25.3.25.2.004.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		- jumlah benih ikan berkualitas - jumlah pelayanan BBI		DKPKP		- 100.000 ekor - 2 fungsi		1.236.255.250	Pendapatan asli daerah, PROV, APBN					1.421.693.538
3.25.3.25.2.003	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap								1.476.262.500	Pendapatan asli daerah					1.697.701.875
3.25.3.25.2.003.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1								1.205.133.000	Pendapatan asli daerah					1.385.902.950
3.25.3.25.2.003.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		- Jumlah dukungan kegiatan P2WKSS - Jumlah kegiatan Gemarikan yang terlaksana - Jumlah lokasi hajat laut/syukuran nelayan		DKPKP		- 1 kegiatan - 1 kegiatan - 8 lokasi		109.687.000	Pendapatan asli daerah, PROV, APBN					126.140.050

3.25.3.25.2.003.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (DAK)		Jumlah alat tangkap ramah lingkungan	DKPKP		42 paket		848.950.000	Pendapatan asli daerah, PROV, APBN			976.292.500
3.25.3.25.2.003.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		Jumlah mesin penggerak kapal penangkapan ikan	DKPKP		265 unit		246.496.000	Pendapatan asli daerah, PROV, APBN			283.470.400
3.25.3.25.2.003.2.02	Kegiatan Pengelolaan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota							44.493.500	Pendapatan			51.167.525
3.25.3.25.2.003.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		- Jumlah fasilitasi peserta asuransi nelayan - Jumlah nelayan yang mendapatkan pemberdayaan	DKPKP		- 500 orang - 50 orang		44.493.500	Pendapatan asli daerah, PROV, APBN			51.167.525
3.25.3.25.2.003.2.03	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)							226.636.000	Pendapatan asli daerah			260.631.400
3.25.3.25.2.003.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		- Jumlah karcis lelang - Jumlah penyelenggara pelelangan ikan	DKPKP		- 11.000 blok - 8 koperasi		226.636.000	Pendapatan asli daerah, PROV, APBN			260.631.400
3.25.3.25.2.005	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan							7.701.000				8.856.150
3.25.3.25.2.005.2.01	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan							7.701.000				8.856.150
3.25.05.2.01.01.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		- Jumlah kelompok masyarakat pengawas - Jumlah lokasi pengawasan	DKPKP		- 11 kelompok - 2 kecamatan		7.701.000	Pendapatan asli daerah, PROV, APBN			8.856.150

Cijulang, 11 Oktober 2021
Kepala Dinas Kelautan, Perikanan
dan Ketahanan Pangan

DEDI SURACHMAN, S.Sos., MM
Pembina, IV/a
NIP. 19710628 200312 1 005

Tabel 5.1
DAFTAR PRIORITAS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Tabel 5.1

No	SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Biaya					Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN/ PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD	Jenis
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								6.173.999.477,00	-	1.742.344.400,00	-	7.916.343.877,00			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								667.836.100	-	600.000.000	-	1.167.836.100,00	1.273.619.710,00		
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN									-	600.000.000	-	600.000.000,00	660.000.000,00		
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								-	-	600.000.000	-	600.000.000,00	660.000.000,00		
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			1. Jumlah lantai jemur yang dibangun 2. Jumlah lumbung pangan masyarakat yang dibangun 3. Jumlah lumbung pangan masyarakat yang diperbaiki 4. Jumlah rice milling unit yang dibangun	1. 3 unit 2. 2 unit 3. 6 unit 4. 4 unit			500.000.000		500.000.000,00	560.000.000,00		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								568.062.600	-	-	-	568.062.600,00	624.868.860,00		
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								58.231.600	-	-	-	58.231.600,00	64.064.760,00		
	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			1. Jumlah kelompok wanita tani 2. Jumlah penerima benih/bibit tanaman	1. 1 kelompok 2. 5 kelompok	40.360.600				40.360.600,00	44.396.660,00		
	Pemantauan Stok, pasokan dan harga pangan	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			Jumlah laporan perkembangan harga bahan pangan pokok	12 dokumen	17.871.000				17.871.000,00	19.666.100,00		
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								509.831.000	-	-	-	509.831.000,00	560.814.100,00		
	Pemberdayaan masyarakat dalam pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			1. Intensitas uji keamanan pangan 2. jumlah dokumen HPS 3. Jumlah kategori penerima penghargaan adhi karya pangan nusantara 4. jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan segar 5. jumlah peserta lomba dipta menu	1. 3 kali 2. 1 dokumen 3. 5 kategori 4. 10 lokasi 5. 10 kelompok	509.831.000				509.831.000,00	560.814.100,00		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								89.773.600	-	-	-	89.773.600,00	98.760.860,00		
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								89.773.600	-	-	-	89.773.600,00	98.760.860,00		
	Koordinasi dan srinkonisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			1. jumlah desa rawan pangan yang di intervensi 2. jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dewan ketahanan pangan 3. jumlah penerima gabah	1. 2 lokasi 2. 1 dokumen 3. 3 kelompok	16.089.000				16.089.000,00	17.697.900,00		
	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten/kota	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah cadangan pangan daerah yang tersedia	100 ton	73.684.500				73.684.600,00	81.062.960,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												-	-		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								5.516.163.377	-	1.242.344.400	-	6.758.607.777,00	7.434.358.664,70		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.644.894.827	-	-	-	3.644.894.827,00	4.009.384.089,70		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								62.697.500	-	-	-	62.697.500,00	67.967.260,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			Jumlah dokumen perencanaan Jumlah jasa tenaga operator	7 dokumen 1 orang	34.337.500				34.337.500,00	37.771.260,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah dokumen laporan triwulan jumlah jasa tenaga	4 dokumen 1 orang 24 dokumen	18.360.000	-	-	-	18.360.000,00	20.196.000,00		
	Kegiatan Administrasi Keuangan Per	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					3.108.708.319				3.108.708.319,00	3.419.679.160,90		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah gaji bulanan yang di bayarkan	14 bulan	3.036.233.319				3.036.233.319,00	3.339.866.660,90		

No	SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Biaya					Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN/ PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD 1/2/3	Jenis
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah dokumen penatausahaan keuangan Jumlah jasa tenaga operator simda keuangan	12 dokumen 1 orang	25.775.000				25.775.000,00	28.352.500,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran				1 dokumen	45.925.000				45.925.000,00	50.517.500,00		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah dokumen laporan akhir jumlah dokumen laporan semester	2 dokumen	775.000				775.000,00	862.500,00		
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					22.850.000				22.850.000,00	25.135.000,00		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah perorangan	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah dokumen penatausahaan BMD Jumlah jasa tenaga operator simda BMD	12 dokumem 1 orang	22.850.000				22.850.000,00	25.135.000,00		
	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					20.870.000				20.870.000,00	22.957.000,00		
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah dokumen pelaporan pendapatan Jumlah jasa tenaga operator simda pendapatan	12 dokumen1 Orang	20.870.000				20.870.000,00	22.957.000,00		
	Kegiatan Adiministrasi Kepegawaian	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					10.950.000				10.950.000,00	12.045.000,00		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undar	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			umlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 kali	10.950.000				10.950.000,00	12.045.000,00		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangin	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					181.059.830				181.059.830,00	199.165.813,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah komponen inetalasi listrik yang di beli	10 jenis	2.439.080				2.439.080,00	2.682.988,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			Jenis ATK yang di beli	95 jenis	81.102.900				81.102.900,00	89.213.190,00		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jenis makanan dan minuman yang di beli	3 jenis	27.662.000				27.662.000,00	30.428.200,00		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jenis barang yang di cetak dan di gandakan	5 jenis	7.043.650				7.043.650,00	7.748.015,00		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah bahan bacaan yang di beli tiap bulan	15 buah	23.359.000				23.359.000,00	25.694.900,00		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 kali	39.453.200				39.453.200,00	43.398.520,00		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					185.056.331				185.056.331,00	203.561.964,10		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah materai	400 buah	2.300.000				2.300.000,00	2.530.000,00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			rekening jasa sumber daya ya	2 rekening	46.347.000					-		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran				1 orang 2 orang 2 orang 1 orang 1 orang	136.409.331				136.409.331,00	150.050.264,10		
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					62.702.647				62.702.647,00	68.972.911,70		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jumlah kendaraan yang berizin	11 unit	45.118.296				45.118.296,00	49.630.125,60		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			jenis perlengkapan kantor yang di pelthara	20 jenis	9.984.351							
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran				3 gedung	7.600.000				7.600.000,00	8.360.000,00		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					1.236.255.250	-	393.394.400	-	1.629.649.650,00			
	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan kecil	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					-	-	393.394.400	-	393.394.400,00	432.733.840,00		
	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil (DAK)	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			- Jumlah kecamatan yang di restocking - Jumlah kelompok binaan	- 10 kecamatan - 50 kelompok			393.394.400		393.394.400,00	432.733.840,00		

No	SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Biaya					Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN/ PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD	Jenis
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
	Kegiatan Pengelolaan pembudidayaan ikan	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					1.236.255.250				1.236.255.250,00	1.359.880.775,00		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			- jumlah benih ikan berkualitas - jumlah pelayanan BBI	- 100.000 ekor - 2 fungsi	1.236.255.250				1.236.255.250,00	1.359.880.775,00		
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					627.312.000	-	848.950.000	-	1.476.262.500,00	1.623.888.750,00		
	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau,Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapatDiusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					356.183.000	-	848.950.000	-				
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			- Jumlah dukungan kegiatan P2WKSS - Jumlah kegiatan Gemarikan yang terlaksana - Jumlah lokasi hajat laut/syukuran nelayan	- 1 kegiatan - 1 kegiatan - 8 lokasi	109.687.000				109.687.000,00	120.655.700,00		
	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (DAK)	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			Jumlah alat tangkap ramah lingkungan	42 paket			848.950.000		848.950.000,00	933.845.000,00		
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			Jumlah mesin penggerak kapal penangkapan ikan	265 unit	246.496.000				246.496.000,00	271.145.600,00		
	Kegiatan Pengelolaan Pemberdayaan	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					44.493.500				44.493.500,00	48.942.850,00		
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			- Jumlah fasilitasi peserta asuransi nelayan - Jumlah nelayan yang mendapatkan pemberdayaan	- 500 orang - 50 orang	44.493.500				44.493.500,00	48.942.850,00		
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					226.636.000				226.636.000,00	249.299.600,00		
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			- Jumlah karcis lelang - Jumlah penyelenggara pelelangan ikan	- 11.000 blok - 8 koperasi	226.636.000				226.636.000,00	249.299.600,00		
	Program Pengawasan Sumber Daya	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					7.701.000				7.701.000,00	8.471.100,00		

No	SKPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Biaya					Prakiraan Maju	Keterangan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		APBD Kabupaten	APBD Provinsi	APBN/ PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total		SKPD	Jenis
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran					7.701.000				7.701.000,00	8.471.100,00		
	Pengawasan Usaha PerikananTangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yangdapat Diusahakan dalamKabupaten/Kota	PD 01	SD 01	Kabupaten Pangandaran			- Jumlah kelompok masyarakat pengawas - Jumlah lokasi pengawasan	- 11 kelompok - 2 kecamatan	7.701.000				7.701.000,00	8.471.100,00		

PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Cijulang, 31 Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan

RIDA NIRWANA K, Sos., M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19680928 198803 1 003